

Strategi Pengembangan Kompetensi Pengelola Satwa Liar Hasil Upaya Penegakan Hukum: Studi Kasus Pengelolaan Burung Kakaktua di Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur

Sri Harteti^{a,1,*}, Asropi^{b,2}, Waldemar Hasiholan^{b,3}

^aPusat Diklat SDM Kementerian Kehutanan, Jl. Mayjen Ishak Juarsa Gunung Batu 141, Bogor 16118

^bPoliteknik STIA LAN, Jl. Administrasi II Pejompangan, Jakarta Pusat 10260

^cPusat Diklat SDM Kementerian Kehutanan, Jl. Mayjen Ishak Juarsa Gunung Batu 141, Bogor 16118

¹sriharteti1@gmail.com *; ²asropi@upnvj.ac.id; ³waldemarhasiholans@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT / ABSTRAK

Article history

Received:

15 Februari 2026

Revised:

25 April 2026

Accepted:

8 Mei 2026

Perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia masih tinggi sehingga pemerintah melakukan penyelamatan melalui penegakan hukum dan mendirikan Lembaga Konservasi Ex-Situ sebagai tempat penitipan sementara. Namun, upaya ini belum sepenuhnya berhasil karena angka kematian satwa masih tinggi. Kematian burung mencapai 90% pada 2023 dan 56% pada 2024 di Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur Jakarta. Burung kakaktua, sebagai satwa dilindungi yang sering diperdagangkan secara ilegal, menjadi prioritas perlindungan. Upaya penyelamatan satwa liar memerlukan kompetensi khusus agar dapat menekan angka kematian. Kompetensi pengelola merupakan salah satu hambatan dalam pengelolaan satwa liar di instansi pemerintah. Penelitian ini menganalisis lima kompetensi yaitu kompetensi taksonomi, medis, perilaku, hukum dan logistik. Tujuan penelitian adalah menganalisis penyebab belum optimalnya kompetensi pengelola burung kakaktua, dan merumuskan strategi pengembangan kompetensi pengelola burung kakaktua. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi pengelola dan merumuskan strategi pengembangan kompetensi pengelola melalui analisis SOAR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pengelola satwa liar belum mencapai tingkat optimal disebabkan belum adanya pelatihan taksonomi, medis, perilaku, dan logistik dan terbatasnya pelatihan hukum terbaru dan turunan, serta belum adanya desain pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Strategi mengembangkan kompetensi pengelola satwa liar dilakukan melalui magang dan *benchmarking* ke lembaga konservasi yang telah berhasil dalam pengelolaan satwa liar, koordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan guna mendesain dan menyelenggarakan program pelatihan secara berkelanjutan serta melakukan kegiatan sosialisasi, seminar, dan workshop melalui kerja sama lintas instansi.

Illegal wildlife trade in Indonesia remains a high-level threat, placing responsibility on the government to conduct wildlife rescue operations through law enforcement mechanisms. One such effort involves the establishment of Ex-Situ Conservation Institutions, which function as temporary shelters for confiscated wildlife. However, these rescue initiatives have not achieved optimal outcomes, as mortality rates remain high. Data from the Tegal Alur Wildlife Rescue Center in Jakarta indicate that bird mortality reached 90% in 2023 and 56% in 2024, highlighting persistent management challenges. Cockatoos, as protected species frequently targeted in illegal trade, are a priority for conservation efforts. Effective wildlife management requires specialized competencies, yet managerial capacity within government institutions remains a critical constraint. This study examines five key competencies of wildlife managers: taxonomy, medical, behavioral, legal, and logistical. The research aims to identify the underlying causes of suboptimal competency among cockatoo managers and to formulate strategies for improvement. A qualitative approach was employed, using in-depth interviews to assess competency gaps and explore practical solutions. The SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) framework was applied to develop strategic recommendations. Findings reveal that competencies among wildlife managers remain insufficient, particularly in taxonomy, medical care, animal behavior, and logistics. In addition, legal knowledge is limited and not consistently updated, while structured and sustainable competency development programs are lacking. To address these challenges, the study recommends implementing internship and benchmarking programs with successful conservation institutions, strengthening collaboration with training centers to design continuous professional development programs, and enhancing cross-agency coordination through outreach, seminars, and workshops.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Kata Kunci: Strategi, Pengembangan kompetensi, Pengelola, Burung kakaktua, Penegakan hukum

Keywords: Strategy, Competency Development, Managers, Parrots, Law Enforcement

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, menempati posisi kedua setelah Brazil. Berdasarkan Widjaja *et al.*, (2014), kekayaan keanekaragaman ini tercermin dari jumlah spesies mamalia 720 jenis, burung 1.599 jenis, amfibi 385 jenis, reptil 723 jenis, dan ikan air tawar 1.248 jenis. Selain nilai ekologis yang tinggi, seperti peran kupu-kupu dan burung dalam penyerbukan dan pengendalian hama, satwa liar juga memiliki nilai ekonomis yang signifikan sebagai sumber pangan, obat-obatan, dan bahan baku industri. Berdasarkan data *Internasional Union for Conservation of Nature* tahun 2022, Indonesia memiliki 1.217 spesies satwa yang terdaftar sebagai spesies terancam punah, setara dengan 2,94% dari total spesies terancam punah global (DataIndonesia.id., 2022).

Ketidakeimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan telah mengakibatkan kerusakan ekosistem, yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan habitat satwa liar. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, seperti perburuan dan perdagangan ilegal, juga menjadi faktor pendorong utama kepunahan berbagai spesies. Permasalahan perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Data menunjukkan peningkatan kasus hingga 5-7% setiap tahunnya (Halimah, 2023). Perdagangan satwa liar, khususnya yang dilindungi atau langka, merupakan tindakan melanggar hukum dan memiliki konsekuensi pidana (Doly, 2015).

Koordinasi dan integrasi pengawasan telah dilakukan Kementerian Kehutanan dengan kepolisian, balai karantina pertanian, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga lainnya untuk menangani perdagangan ilegal satwa liar. Satwa liar hasil kegiatan pengawasan tersebut merupakan barang bukti sitaan yang dapat dititipkan untuk sementara di lembaga konservasi khusus milik pemerintah atau non pemerintah yang termasuk *ex-situ* (Hasiholan, 2018). Namun pengelolaan satwa liar di lembaga konservasi khusus milik pemerintah menunjukkan masih adanya permasalahan yaitu kematian satwa (Tribun Maluku, 2019), satwa masih jinak dan satwa kurang sehat (Birahy, 2021).

Salah satu lembaga konservasi khusus milik pemerintah adalah Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tegal Alur yang dikelola Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta. PPS Tegal Alur berfungsi sebagai tempat perlindungan satwa, penyelamatan satwa, perawatan satwa dan/atau pemeliharaan satwa yang bersifat sementara dari hasil penegakan hukum, penyerahan dari masyarakat, dan evakuasi terhadap satwa liar yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut maka pengelola PPS Tegal Alur wajib: 1) mengelola dengan memelihara dan merawat satwa sesuai dengan etika dan kesejahteraan satwa; 2) mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidangnya; 3) melakukan pencegahan terhadap penularan penyakit; 4) melakukan upaya pengamanan dan menjaga keselamatan petugas dan satwa; dan 5) membuat dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan perkembangan pengelolaan kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan tembusan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (BKSDA, 2018).

Pengelolaan satwa liar yang masuk ke PPS Tegal Alur dimulai dari pemeriksaan kesehatan dan kelayakan untuk dilepasliarkan. Jika semua syarat terpenuhi maka satwa liar tersebut dapat dilepasliarkan langsung ke habitatnya, Namun bila tidak memenuhi persyaratan maka satwa tersebut dititipkan sementara untuk dikelola di PPS Tegal Alur sampai adanya putusan sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah). Satwa liar yang masuk ke PPS Tegal Alur terdiri dari burung, reptil, primata dan mamalia. Data satwa liar hasil penegakan hukum yang masuk di PPS Tegal Alur tahun 2023-2024 lebih besar dibandingkan penyerahan masyarakat, yaitu sebesar 75,44% satwa liar hasil penegakan hukum dan 24,56% satwa liar penyerahan masyarakat pada tahun 2023 dan sebesar 68,76% satwa liar hasil penegakan hukum dan 31,24% satwa liar penyerahan masyarakat pada tahun 2024.

Berdasarkan data PPS Tegal Alur menunjukkan bahwa kematian burung sebesar 90% lebih tinggi dibandingkan satwa lainnya yaitu mamalia 1%, primata 2% dan reptilia 7% tahun 2023 dan kematian burung sebesar 56%, mamalia 8%, primata 3% dan reptil 33% tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan burung merupakan satwa liar yang tingkat kematiannya lebih tinggi dibandingkan jenis satwa liar lainnya. Berdasarkan data kematian jenis-jenis burung di PPS Tegal Alur menunjukkan burung kakaktua yang mati sebesar 25% pada tahun 2023 dan 28% pada tahun 2024. Masih tingginya tingkat kematian satwa liar, menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan belum optimal dalam menyelamatkan satwa liar termasuk burung kakaktua dari upaya mencegah kepunahan atau kematian. Hal ini menjadi penting sehingga menjadi fokus penelitian karena burung kakaktua merupakan satwa prioritas dilindungi, endemik Indonesia, sering menjadi target perdagangan ilegal, serta memiliki peran ekologis penting sebagai penyebar biji yang mendukung regenerasi hutan (Mardiastuti *et al.*, 2011; Puspa, 2020; White *et al.*, 2011). Tingginya angka kematian burung ini tidak hanya meningkatkan risiko penurunan populasi dan kepunahan, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem hutan. Selain itu, kondisi ini menimbulkan kerugian negara karena biaya penyelamatan, perawatan, dan penegakan hukum tidak mencapai hasil optimal. Hal ini menegaskan bahwa penyelamatan satwa liar memerlukan kompetensi khusus, sementara keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) masih menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pengelolaan satwa liar (Rivera *et al.*, 2021). Oleh karena itu, pengembangan kompetensi SDM secara berkelanjutan menjadi kunci untuk

meningkatkan efektivitas pengelolaan dan menekan angka kematian satwa (Indrawan *et al.*, 2007; Wardoyo, 2021). SDM yang dibutuhkan untuk mengelola PPS adalah dokter hewan sebagai tenaga medis, tenaga paramedis dan *animal keeper* (perawat satwa), tenaga keamanan dan tenaga administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi.

Penelitian ini didasarkan pada *grand* teori kompetensi yang dikemukakan oleh McClelland (1973), yang menyatakan bahwa kinerja individu lebih dipengaruhi kompetensi dibandingkan kecerdasan. Secara lebih spesifik, penelitian ini menggunakan model kompetensi Spencer & Spencer (1993) sebagai *general* teori untuk menjelaskan hubungan antara kompetensi dan kinerja individu. Kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang atau individu yang berkaitan dengan efektivitas kinerja dan atau kinerja superior dalam suatu pekerjaan tertentu. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya (Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil). Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada teori *human capital* yang dikemukakan oleh Becker (1962) yang menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi merupakan bentuk investasi strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalam pengelolaan satwa liar, teori ini relevan karena kualitas pengelola sangat menentukan keberhasilan konservasi satwa liar.

Menurut IUCN (2022), kompetensi keahlian yang harus dimiliki dalam penanganan satwa liar hasil sitaan adalah: keahlian taksonomi untuk mengidentifikasi satwa liar dengan cepat dan akurat; keahlian medis terkait bidang kesehatan hewan, termasuk karantina; keahlian perilaku yang sesuai dengan jenis satwa liar; keahlian hukum dan keahlian logistik untuk memberi masukan terkait penyimpanan dan pengangkutan satwa liar. Kelima kompetensi ini mencerminkan kebutuhan multidisiplin dalam pengelolaan satwa liar hasil penegakan hukum, yang tidak hanya memerlukan pemahaman biologis, tetapi juga aspek kesehatan, perilaku, regulasi, serta dukungan operasional. Semakin tinggi kompetensi pengelola satwa liar akan meningkatkan penyelamatan satwa liar yaitu meningkatkan jumlah kelahiran dan menurunkan jumlah kematian satwa liar (Fahik *et al.*, 2018).

Penelitian sebelumnya lebih banyak berkaitan dengan aspek biologis dan teknis penangkaran (Cita *et al.*, 2019; Suryani *et al.*, 2021; Pratiwi, 2022; Alfian *et al.*, 2024) dan pengelolaan satwa liar di instansi non pemerintah (Cita *et al.*, 2019; Emihandayani, 2019; Syaputra *et al.*, 2022). Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat kekosongan penelitian terkait kompetensi sumber daya manusia sebagai penentu utama keberhasilan konservasi di lembaga pemerintah. Dengan demikian kebaruan penelitian ini berdasarkan aspek yang diteliti yaitu pengembangan kompetensi pengelola satwa liar di PPS yang merupakan lembaga konservasi pemerintah dan adanya perumusan strategi melalui analisis *Strength, Opportunity, Aspiration & Result* (SOAR) yang dapat dijadikan masukan bagi penyelesaian masalah belum optimalnya kompetensi pengelola satwa liar di PPS yang dikelola pemerintah.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah: 1) menganalisis penyebab belum optimalnya kompetensi pengelola burung kakaktua, dan 2) merumuskan strategi pengembangan kompetensi pengelola burung kakaktua. Secara umum penelitian ini bermanfaat secara praktis: 1) memberikan masukan bagi Lembaga Konservasi *Ex-Situ* yang dikelola pemerintah dalam mengembangkan kompetensi pengelola burung kakaktua di PPS, dan 2) memberikan masukan bagi lembaga pelatihan dalam merancang program pelatihan untuk mengembangkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN yang terlibat pengelolaan burung kakaktua di PPS. Manfaat secara teoritis adalah memberikan landasan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya yang fokus pada pengembangan kompetensi pengelola burung kakaktua di PPS.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali lebih dalam makna di balik fenomena yang terjadi. Metode kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kondisi kompetensi pengelola satwa liar serta strategi pengembangan kompetensinya dalam pengelolaan burung kakaktua hasil penegakan hukum.

Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus. Sumber data primer terdiri atas 10 orang pengelola PPS Tegal Alur serta 3 orang pakar konservasi dan pengelolaan satwa liar, secara rinci dijelaskan pada masing-masing tujuan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang meliputi laporan kinerja PPS Tegal Alur, standar operasional prosedur (SOP), peraturan perundang-undangan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta literatur ilmiah yang relevan.

Pada tujuan pertama, yaitu menganalisis penyebab belum optimalnya kompetensi pengelola, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 10 orang informan yang dipilih secara *purposive sampling* yaitu 1 orang koordinator pengelola satwa, 1 orang dokter hewan, 5 orang perawat satwa dan 3 orang tenaga administrasi. Informan dipilih berdasarkan pengalaman kerja dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan satwa

liar, khususnya burung kakaktua. Pengumpulan data dilakukan menggunakan pedoman wawancara dengan pendekatan skoring yang dimodifikasi dari Taksonomi Bloom (Tabel 1) untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi saat ini dan kompetensi yang seharusnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif.

Tabel 1. Ukuran kuantitatif terhadap penilaian kompetensi pengelola satwa liar (modifikasi dari taksonomi bloom).

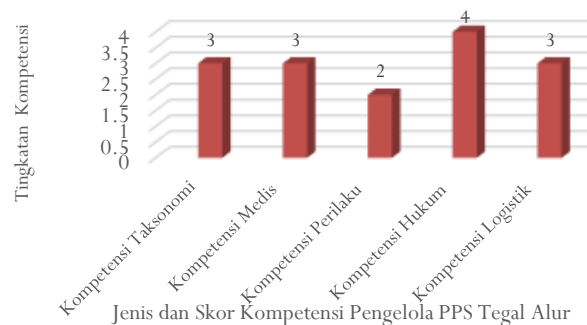
Skor	Kriteria	Keterangan
5	Sangat tinggi	Mengembangkan kompetensi dengan optimal melalui berbagai kasus yang perlu dipecahkan dengan mengkreasikan yang baru (C6/membuat).
4	Tinggi	Memiliki kompetensi dengan baik sehingga dapat membuktikan (C5/mengevaluasi).
3	Sedang	Memiliki kompetensi spesifik satwa liar terbatas, namun sering dilakukan dengan menelaah/memeriksa (C4/menganalisis).
2	Rendah	Memiliki kompetensi dasar satwa liar (C1 - C3/mengingat, memahami dan mengaplikasikan).
1	Sangat rendah	Tidak memiliki kompetensi sama sekali

Pada tujuan kedua, yaitu merumuskan strategi pengembangan kompetensi pengelola, data primer diperoleh melalui diskusi kelompok terfokus yang melibatkan 10 orang pengelola PPS Tegal Alur dan 3 orang pakar. Responden pakar ditentukan secara *purposive sampling* yang berasal dari Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan (1 orang), Institut Pertanian Bogor (1 orang), dan Taman Safari Indonesia (1 orang). Pemilihan pakar didasarkan kriteria: (1) memiliki pengetahuan dan pengalaman pengelolaan satwa liar, khususnya burung kakaktua; (2) memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan kompetensi terkait aspek taksonomi, medis, perilaku, hukum, dan logistik; serta (3) bersedia memberikan informasi secara komprehensif. Analisis strategi pengembangan kompetensi pengelola menggunakan analisis SOAR.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Kesenjangan Kompetensi Pengelola PPS Tegal Alur

Kompetensi pengelola satwa liar dalam penelitian ini mengacu pada kerangka IUCN (2022) yang mencakup lima kompetensi, yaitu kompetensi taksonomi, medis, perilaku, hukum, dan logistik. Berdasarkan hasil wawancara, skor kompetensi merepresentasikan tingkat penguasaan dan penerapan kemampuan pengelola, yaitu skor 4 menunjukkan kompetensi tinggi (mampu menerapkan kompetensi dengan baik), skor 3 menunjukkan kompetensi sedang (cukup mampu namun masih terbatas), dan skor 2 menunjukkan kompetensi rendah (belum mampu menerapkan secara memadai), dapat dilihat pada Gambar 1. Secara khusus, skor 2 pada kompetensi perilaku merupakan temuan krusial karena menunjukkan keterbatasan dalam memahami dan menangani perilaku satwa, yang berpotensi meningkatkan stres hingga kematian satwa. Pembahasan rinci dijelaskan pada masing-masing kompetensi.



Gambar 1. Tingkatan kompetensi pengelola PPS Tegal Alur.

3.1.1. Kompetensi Taksonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor kompetensi taksonomi berada pada kategori sedang (skor 3), masih di bawah standar yang diharapkan (skor ideal 5). Dengan demikian terdapat kesenjangan sebesar 2 poin yang menunjukkan bahwa kompetensi medis pengelola belum optimal. Secara aktual, pengelola mampu mengidentifikasi jenis burung kakaktua secara umum, namun belum mampu melakukan identifikasi secara rinci.

Salah satu responden yaitu Jemy Piter Karubun selaku koordinator pengelola PPS Tegal Alur menyatakan: “Untuk identifikasi cepat, kita masih mengandalkan pengalaman dan referensi yang terbatas. Meskipun ada aplikasi yang bisa membantu identifikasi, seperti aplikasi yang mendeteksi bulu burung, namun kita masih membutuhkan pengetahuan yang mendalam serta jenis satwa yang belum pernah masuk ke PPS Tegal Alur. Misalnya, untuk burung kakaktua, ada beberapa jenis yang mirip tapi berbeda status konservasinya. Misalnya burung kakaktua koki dan kakaktua galerita. Tanpa pengetahuan yang cukup, kita bisa salah mengidentifikasi burung tersebut. Kesalahan identifikasi bisa mengakibatkan kesalahan menentukan jenis satwa dilindungi, kesalahan menangani satwa seperti memberi pakan serta kesalahan melakukan pelepasliaran satwa ke habitat asalnya sehingga akan menimbulkan satwa stres dan akhirnya mengakibatkan kematian. Selama ini kami hanya mengenali jenis secara umum, belum sampai detail klasifikasinya”.

Kondisi ideal yang diharapkan adalah pengelola mampu mengidentifikasi hingga tingkat spesies secara akurat sesuai kaidah taksonomi. Menurut Pangsuma dan Hidayat (2023), taksonomi berperan penting dalam penamaan dan pengklasifikasian organisme baik tumbuhan dan satwa liar berdasarkan karakteristik morfologi, fisiologi, dan genetiknya, sehingga memudahkan proses identifikasi dan deskripsi organisme tersebut. Kompetensi taksonomi menjadi aspek krusial dalam pengelolaan satwa liar karena memungkinkan pengelola untuk mengidentifikasi jenis satwa dengan lebih akurat. Pengelola yang memiliki pemahaman taksonomi yang baik dapat membedakan antara satwa liar yang dilindungi dan yang tidak dilindungi secara tepat. Kemampuan ini mendukung pengambilan keputusan konservasi yang efektif, memungkinkan penanganan satwa dilakukan sesuai kebutuhannya, serta memperkuat proses penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran.

Kesenjangan kompetensi ini disebabkan belum adanya pelatihan taksonomi atau identifikasi satwa liar yang diikuti oleh pengelola. Berdasarkan data dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SDM Kementerian Kehutanan, hanya terdapat satu kali pelatihan identifikasi satwa liar yang diselenggarakan selama tahun 2016 - 2024.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi, PPS Tegal Alur melakukan kegiatan *benchmarking* ke lembaga konservasi seperti Taman Safari dan Lembang Park and Zoo. Jemy Piter Karubun sebagai koordinator menyatakan bahwa: “Peningkatan kapasitas yang dilakukan di PPS adalah mengunjungi Lembaga Konservasi (LK) untuk belajar langsung yaitu Taman Safari Indonesia dan Lembang Park and Zoo Bandung. Metodenya dokter hewan belajar dengan dokter hewan di LK, perawat satwa belajar dengan perawat satwa di LK, fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) yang bertugas melakukan administrasi belajar dengan bagian administrasi di LK”. Namun kegiatan ini tidak rutin dan berkelanjutan.

Dengan demikian masih terdapat kesenjangan pada aspek pengetahuan dan keterampilan teknis dalam taksonomi. Penyebab utama kesenjangan ini adalah: (1) Belum adanya pelatihan khusus terkait taksonomi satwa liar dan (2) Belum adanya desain pengembangan kompetensi yang rutin dan berkelanjutan.

3.1.2. Kompetensi Medis

Menurut Wild Welfare.org (2025_a), kompetensi medis diperlukan untuk meminimalkan rasa sakit, cedera, atau penyakit pada satwa, serta untuk mengembangkan praktik kesejahteraan satwa yang optimal. Kompetensi ini berperan penting dalam mencegah cedera lanjutan, penularan penyakit, serta risiko kematian akibat penanganan yang tidak tepat.

Berdasarkan hasil penelitian, kompetensi medis di PPS Tegal Alur berada pada kategori sedang (skor 3), masih di bawah standar yang diharapkan (skor ideal 5). Dengan demikian terdapat kesenjangan sebesar 2 poin yang menunjukkan bahwa kompetensi medis pengelola belum optimal. Secara aktual, penanganan medis sudah dilakukan, namun masih terbatas pada tindakan dasar dan belum didukung oleh kemampuan teknis yang memadai, terutama dalam penentuan jenis dan dosis obat, serta teknik pengambilan sampel.

Salah satu informan yaitu drh. Shovia Hairani menyatakan bahwa: “Perlu dilakukan pelatihan standar pengobatan satwa liar karena berbeda dengan satwa domestik peliharaan manusia. Kesalahan jenis obat dan dosis dapat berdampak pada kematian satwa”. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi medis berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan satwa yang ditangani.

Kondisi ideal yang diharapkan adalah pengelola memiliki kemampuan medis yang komprehensif, meliputi diagnosa, penentuan jenis dan dosis obat yang tepat, serta pelaksanaan tindakan medis sesuai standar satwa liar. Kompetensi ini menjadi krusial mengingat keberagaman jenis satwa liar yang ditangani memerlukan pendekatan medis yang spesifik.

Kesenjangan kompetensi medis ini disebabkan kurangnya pelatihan teknis medis satwa liar menyebabkan kompetensi tidak berkembang secara optimal. Hal ini diperkuat oleh pernyataan drh. Shovia Hairani bahwa “Pelatihannya sangat jarang dan lebih banyak bersifat administrasi, bukan teknis”. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi medis belum didukung oleh sistem pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, sehingga berdampak pada belum optimalnya kualitas penanganan medis satwa liar.

3.1.3. Kompetensi Perilaku

Menurut Rudiansyah dan Radhi (2019), perilaku satwa liar merupakan respons terhadap rangsangan internal dengan memanfaatkan stimulus yang diperoleh dari lingkungannya. Satwa liar hasil penegakan hukum yang ditempatkan dalam kandang sering mengalami stres akibat perubahan lingkungan yang drastis dari habitat alaminya. Pemicu stres tersebut karena satwa tidak memiliki perilaku adaptif untuk menghadapi lingkungan baru (Wild Welfare.org, 2025_b).

Berdasarkan hasil wawancara, kasus stres banyak terjadi pada satwa hasil penyelundupan yang sebelumnya ditempatkan dalam kondisi tidak layak, seperti kandang sempit atau tertutup. Pada burung kakaktua, stres ditunjukkan melalui perilaku abnormal seperti mencabuti bulu, menabrakkan diri ke kandang, serta kehilangan nafsu makan. Hal ini sejalan dengan Seibert (2006) yang menyatakan bahwa burung paruh bengkok menunjukkan stres melalui perilaku abnormal seperti mencabuti bulu, melukai diri, berteriak, agresif, dan menggigit.

Menurut Wild Welfare.org (2025_b), perilaku abnormal merupakan indikator bahwa satwa liar berada dalam kondisi tidak sejahtera atau tidak sehat. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kesehatan yang serius hingga kematian. Oleh karena itu, kompetensi pengelola dalam memahami dan menangani perilaku satwa liar sangat penting agar satwa dapat mengekspresikan perilaku alaminya yang mencerminkan kebebasan dari rasa takut dan tekanan. Satwa akan menunjukkan perilaku normal apabila kebutuhan perilaku mereka terpenuhi melalui pengelolaan lingkungan dan penyediaan fasilitas yang sesuai.

Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa kompetensi perilaku pengelola berada pada kategori rendah (skor 2), jauh di bawah standar yang diharapkan (skor ideal 5). Dengan demikian terdapat kesenjangan sebesar 3 poin yang menunjukkan bahwa kompetensi perilaku pengelola belum memadai. Secara aktual, pengelola masih kesulitan dalam memahami perilaku satwa liar, terutama dalam membedakan antara perilaku normal dan indikasi stres.

Menurut informan yaitu Ismet Permana dan Okeu Sunandar sebagai perawat satwa dalam kutipan wawancara menyatakan bahwa “Perilaku satwa liar masih membingungkan, ada yang terlihat normal tetapi tiba-tiba mati”. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman terhadap perilaku satwa berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kondisi stres yang berdampak pada kematian.

Kondisi ideal yang diharapkan adalah pengelola mampu memahami perilaku satwa secara komprehensif, termasuk mengenali tanda-tanda stres serta menerapkan teknik penanganan yang tepat. Kompetensi ini penting untuk memastikan satwa dapat mengekspresikan perilaku alaminya sebagai bagian dari prinsip kesejahteraan satwa.

Kesenjangan kompetensi perilaku ini disebabkan oleh belum adanya pelatihan perilaku satwa liar sehingga pengelola hanya mengandalkan pengalaman lapangan. Penanganan perilaku stres yang dilakukan saat ini masih bersifat reaktif, seperti memisahkan satwa yang menunjukkan gejala stres ke dalam kandang tertutup untuk observasi. Namun pendekatan ini belum berbasis pada analisis perilaku yang sistematis sehingga hasilnya belum konsisten.

3.1.4. Kompetensi Hukum

Aktivitas perburuan dan perdagangan ilegal merupakan faktor utama yang diduga berkontribusi besar terhadap kepunahan satwa liar yang dilindungi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah menetapkan beberapa regulasi, antara lain Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, yang mencakup 532 jenis burung yang dilindungi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan ini menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, dan pelanggar dapat dikenai sanksi pidana. Dalam konteks ini, kompetensi hukum menjadi sangat penting untuk menyelamatkan satwa liar, terutama bagi para pengelola dan penyidik yang bertugas menangani kasus-kasus perdagangan dan penyelundupan satwa liar.

Berdasarkan hasil penelitian, kompetensi hukum pengelola berada pada kategori cukup tinggi (skor 4), namun belum mencapai kondisi ideal (skor ideal 5). Dengan demikian terdapat kesenjangan sebesar 1 poin yang menunjukkan bahwa kompetensi hukum relatif baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Secara aktual, pengelola telah memiliki pemahaman terhadap regulasi dasar dan terlibat menjadi saksi ahli dalam kasus satwa liar.

Jemy Piter Karubun selaku koordinator dan Silvandrey H.G. Pasaribu selaku PEH menjelaskan masih perlunya pemahaman terkait peraturan, seperti yang tertuang dalam kutipan wawancara berikut ini: “Dalam hal hukum, kita fungsional PEH sering terlibat sebagai saksi ahli dalam kasus-kasus satwa. Kita harus memahami undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Masih ada beberapa peraturan baru yang belum sepenuhnya kita pahami seperti

Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa masih perlu kita pelajari dalam pelatihan.”

Kondisi ideal yang diharapkan adalah pengelola memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh regulasi, termasuk peraturan turunan dan pembaruan kebijakan, serta mampu mengimplementasikannya secara tepat dalam penanganan satwa liar sebagai barang bukti dalam proses penegakan hukum. Kesenjangan kompetensi hukum ini disebabkan terbatasnya pelatihan terkait peraturan baru dan peraturan turunan.

Meskipun demikian, dibandingkan dengan kompetensi lainnya, kompetensi hukum menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan kompetensi hukum telah baik, namun masih perlu ditingkatkan agar mencapai standar optimal.

3.1.5. Kompetensi Logistik

Kandang merupakan salah satu komponen logistik yang sangat penting dalam pengelolaan satwa liar. Ketersediaan kandang dengan ukuran dan fasilitas pendukung yang sesuai, seperti tempat bertengger, tempat makan dan minum, merupakan bagian dari penerapan prinsip kesejahteraan satwa. Desain kandang yang tepat memungkinkan satwa mengekspresikan perilaku alaminya serta mengurangi tingkat stres.

Guna memastikan prinsip kesejahteraan satwa tersebut maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Spesifikasi Teknis Kandang Transportasi dan Kandang Transit Satwa Liar. Namun dalam prakteknya, proses transportasi dan penampungan satwa liar masih menyebabkan stres bahkan kematian satwa liar. ProFauna Indonesia (2025) mencatat sekitar 40% satwa liar yang diperdagangkan mengalami kematian akibat penanganan yang tidak memadai, termasuk penggunaan kandang yang tidak sesuai. Hal ini diperkuat oleh Wild Welfare.org (2025_c), yang menyatakan bahwa proses transportasi sangat rentan menyebabkan stres pada satwa liar.

Berdasarkan hasil penelitian, kompetensi logistik pengelola berada pada skor 3 (kategori sedang), masih di bawah kondisi ideal (skor ideal 5). Dengan demikian terdapat kesenjangan sebesar 2 poin yang menunjukkan bahwa kompetensi logistik belum optimal. Secara aktual, pengelolaan kandang sudah dilakukan, namun belum mampu mengantisipasi lonjakan jumlah satwa yang masuk sehingga sering terjadi kelebihan kapasitas kandang.

Narwandi sebagai perawat satwa menyebutkan: “Kapasitas kandang tidak mencukupi ketika satwa datang dalam jumlah besar, sehingga terpaksa menggunakan kandang transport yang kecil dan menyebabkan satwa stres”. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas dan pengelolaan logistik berdampak langsung terhadap kesejahteraan satwa. Kelebihan kapasitas ini berdampak pada terganggunya kenyamanan dan menghambat kebebasan satwa liar dalam mengekspresikan perilaku alaminya. Ini sesuai pendapat Jemy Piter Karubun selaku koordinator menyebutkan bahwa yang melatarbelakangi banyak satwa yang stres dan mati adalah: “Biasanya saat satwa masuk ke PPS, kondisinya sudah stres karena jumlahnya yang banyak dan diletakkan dalam kandang transport yang kecil, misalnya burung-burung kecil diletakkan dalam satu kandang yang harusnya hanya diisi 2 ekor, namun diisi 50 ekor, sehingga pasti ada yang mati dan banyak yang stres. Hal ini disebabkan kondisi kandang yang sempit, tidak seperti habitatnya di hutan yang luas. Kemudian saat mereka dirawat di PPS juga membutuhkan waktu lama karena lamanya proses di pengadilan sehingga terdapat satwa liar yang mati di PPS”.

Kondisi ideal yang diharapkan adalah tersedianya sistem pengelolaan kandang yang terencana, adaptif, dan sesuai standar, termasuk kemampuan pengelola dalam menentukan spesifikasi kandang yang tepat untuk berbagai jenis satwa serta mengantisipasi kondisi darurat seperti lonjakan jumlah satwa yang masuk.

Kesenjangan kompetensi logistik ini disebabkan belum adanya pelatihan spesifikasi teknis kandang transportasi, kandang transit dan perencanaan kandang untuk menghadapi banyaknya jumlah satwa yang masuk karena kasus penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan kandang masih bersifat reaktif dan belum berbasis pada perencanaan yang sistematis. Dampak dari kondisi tersebut menyebabkan pengelola kesulitan menjaga kesejahteraan satwa secara konsisten, terutama dalam kondisi tekanan operasional yang tinggi.

Berdasarkan hasil analisis pada masing-masing kompetensi, maka penyebab kesenjangan kompetensi pengelola satwa liar dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Penyebab kesenjangan kompetensi pengelola satwa liar

No	Kompetensi	Penyebab Kesenjangan Kompetensi
1	Kompetensi taksonomi	Belum adanya pelatihan taksonomi satwa liar. Belum adanya desain pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.
2	Kompetensi medis	Belum adanya pelatihan teknis medis satwa liar.
3	Kompetensi perilaku	Belum adanya pelatihan perilaku satwa liar.
4	Kompetensi hukum	Terbatasnya pelatihan terkait peraturan baru dan peraturan turunan.

5	Kompetensi logistik	Belum adanya pelatihan spesifikasi teknis kandang transportasi, kandang transit dan perencanaan kandang untuk menghadapi banyaknya satwa yang masuk
---	---------------------	---

3.2. Strategi Pengembangan Kompetensi Pengelola PPS Tegal Alur

Mengingat masih adanya kesenjangan dalam lima kompetensi, diperlukan strategi pengembangan kompetensi yang tepat untuk memperkuat kemampuan yang telah dimiliki pengelola PPS Tegal Alur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sementara satwa liar hasil penegakan hukum. Strategi pengembangan kompetensi ini dianalisis menggunakan pendekatan SOAR, karena pendekatan ini berfokus pada penggalian faktor-faktor positif yang dimiliki oleh PPS Tegal Alur saat ini untuk mendukung keberhasilan jangka panjang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara maka dilakukan analisis SOAR sehingga diidentifikasi empat faktor yang dimiliki PPS Tegal Alur yang dapat dilihat pada Tabel 3. Identifikasi empat faktor tersebut yaitu faktor kekuatan, peluang, harapan, dan hasil pada matriks ini menjadi dasar penyusunan strategi. Matriks ini digunakan merumuskan arah pengembangan kompetensi pengelola PPS Tegal Alur secara sistematis.

Tabel 3. Matriks SOAR pengembangan kompetensi pengelola PPS Tegal Alur

	Kekuatan/ <i>Strengths</i> (S):	Peluang/ <i>Opportunities</i> (O):
	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPS Tegal Alur merupakan satu-satunya PPS yang dibangun di atas tanah negara dan dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah yang telah berpengalaman dalam penyelamatan satwa. 2. PPS Tegal Alur memiliki tenaga pengelola yang cukup lengkap yaitu dokter hewan dan pemelihara satwa 3. PPS Tegal Alur memiliki sarana dan prasarana pengelolaan satwa yang cukup lengkap 4. PPS Tegal Alur menjadi tempat praktik pelatihan serta kunjungan anak sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kebijakan pembangunan Sumber Daya Manusia dalam prioritas nasional dari asta cita pemerintah kabinet merah putih dan kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan untuk menjaga kekayaan keanekaragaman hayati 2. Tersedianya peraturan tentang bentuk-bentuk pengembangan kompetensi yang dapat meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN yaitu Peraturan LAN 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil 3. Tersedianya Pusat Diklat SDM yang memiliki berbagai jenis dan metode pelatihan 4. Terjalinnnya kerjasama dengan instansi dan lembaga konservasi lainnya
Harapan/ <i>Aspirations</i> (A):	Strategi SA	Strategi OA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kinerja PPS Tegal Alur dalam penyelamatan satwa (<i>survive</i>) 2. Meningkatnya kompetensi pengelola PPS Tegal Alur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran pengelola yang sudah berpengalaman untuk menjadi coach dan mentor bagi pengelola lainnya - Melakukan bimtek dengan mengundang narasumber yang berkompeten 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan magang dan <i>benchmarking</i> ke LK yang sudah berhasil - Berkoordinasi dengan Pusat Diklat untuk melakukan program peningkatan kompetensi melalui pelatihan - Melakukan sosialisasi, seminar dan workshop bekerja sama dengan instansi lain
Hasil/ <i>Results</i> (R):	Strategi SR	Strategi OR
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya PPS Tegal Alur menjadi Lembaga Konservasi Khusus yang memenuhi standar pengelolaan 2. Meningkatnya persentase translokasi satwa dari PPS Tegal Alur 3. Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN PPS Tegal Alur 	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk komunitas belajar yang dilakukan rutin berkolaborasi dengan pihak lain - Pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan satwa untuk belajar mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengembangan kompetensi pengelola melalui diklat klasikal/non klasikal paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun

Untuk memilih strategi yang akan diterapkan maka setiap faktor analisis SOAR diberikan penilaian bobot, rating dan skor. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai bobot, rating dan skor faktor pada setiap faktor analisis SOAR

No	Faktor	Bobot	Rating	Skor
1	Kekuatan			
	1) PPS Tegal Alur merupakan satu-satunya PPS yang dibangun di atas tanah negara dan dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah yang telah berpengalaman dalam penyelamatan satwa.	0,26	4	1,04
	2) PPS Tegal Alur memiliki tenaga pengelola yang lengkap yaitu tersedianya dokter hewan dan pemelihara satwa.	0,32	4	1,28
	3) PPS Tegal Alur memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap yaitu kandang karantina, kandang pemeliharaan yang sesuai dengan jenis satwa, klinik dan gudang pakan.	0,21	3	0,63
	4) PPS Tegal Alur menjadi tempat praktik pelatihan serta kunjungan anak sekolah.	0,21	2	0,42
	Jumlah	1,00		3,37
2	Peluang			
	1) Tersedianya kebijakan pembangunan SDM dalam prioritas nasional dari asta cita pemerintah kabinet merah putih dan kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan untuk menjaga kekayaan keanekaragaman hayati	0,33	4	1,32
	2) Tersedianya peraturan tentang bentuk-bentuk pengembangan kompetensi yang dapat meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN yaitu Peraturan LAN 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.	0,25	4	1,00
	3) Tersedianya Pusat Diklat SDM yang memiliki berbagai bentuk metode dan jenis pelatihan.	0,25	4	1,00
	4) Terjalinnnya kerjasama dengan instansi dan lembaga konservasi lainnya.	0,17	3	0,51
	Jumlah	1,00		3,83
3	Harapan			
	1) Meningkatkan kinerja PPS Tegal Alur dalam penyelamatan satwa (<i>survive</i>)	0,50	5	2,50
	2) Meningkatkan kompetensi pengelola PPS Tegal Alur.	0,50	4	2,00
	Jumlah	1,00		4,50
4	Hasil			
	1) Terwujudnya PPS Tegal Alur menjadi Lembaga Konservasi Khusus yang memenuhi standar pengelolaan.	0,40	5	2,00
	2) Meningkatkan persentase translokasi satwa dari PPS Tegal Alur.	0,27	4	1,08
	3) Meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN PPS Tegal Alur.	0,33	4	1,32
	Jumlah	1,00		4,40

Mengacu pada hasil pengolahan data pada Tabel 4, diperoleh nilai skor kekuatan (S) 3,37 lebih rendah daripada skor peluang (O) 3,83. Adapun nilai skor harapan (A) 4,50 lebih tinggi daripada nilai skor hasil (R) 4,40. Data tersebut menunjukkan bahwa peluang eksternal yang tersedia lebih besar dibandingkan kekuatan internal yang dimiliki, serta harapan pengembangan kompetensi belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu diperlukan kombinasi nilai tersebut untuk menentukan strategi yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kombinasi strategi

	<i>Strengths (S)</i>	<i>Opportunities (O)</i>
<i>Aspirations (A)</i>	Menggunakan kekuatan internal untuk mewujudkan aspirasi yang diinginkan $S - A = 7,87$	Memanfaatkan peluang untuk mewujudkan aspirasi yang diinginkan $O - A = 8,33$
<i>Results (R)</i>	Menggunakan kekuatan internal untuk mencapai hasil yang dituju $S - R = 7,77$	Memanfaatkan peluang untuk mencapai hasil yang dituju $O - R = 8,23$

Analisis strategi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan SOAR (*Strengths, Opportunities, Aspirations, Results*) yang dikembangkan oleh Stavros, *et al.*, (2003), yang menekankan pada perencanaan strategis berbasis kekuatan dan pemanfaatan peluang untuk mencapai aspirasi dan hasil yang diharapkan. Penentuan empat faktor SOAR dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui sintesis hasil analisis kesenjangan kompetensi dan diskusi kelompok terfokus dengan pengelola satwa liar serta pakar. Selanjutnya, untuk menentukan prioritas strategi, dilakukan penilaian terhadap kombinasi empat faktor SOAR. Fokus pada analisis SOAR terletak pada unsur *strengths* dan *opportunities* yang dikombinasikan dengan unsur *aspirations* dan *results*. Hasil dari empat kombinasi pada unsur SOAR tersebut akan ditemukan nilai yang tertinggi dan selanjutnya ditetapkan sebagai strategi terbaik. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Biryanto (2024) yang menunjukkan bahwa penilaian kombinasi strategi SOAR dapat digunakan untuk menentukan strategi prioritas secara sistematis. Berdasarkan Tabel 5, kombinasi strategi O–A memiliki nilai tertinggi (8,33), yang menunjukkan bahwa strategi yang paling efektif adalah memanfaatkan peluang eksternal untuk mencapai harapan yang diinginkan, melalui kegiatan magang dan *benchmarking* ke lembaga konservasi, penguatan pelatihan melalui Pusat Diklat SDM, serta penyelenggaraan sosialisasi, seminar, dan workshop bekerja sama dengan instansi lain. Hal ini sesuai dengan Zalukhu *et al.*, (2025) yang menyatakan bahwa pelatihan merupakan metode efektif dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja SDM secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan & Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menawarkan model pengembangan kompetensi berbasis SOAR yang belum banyak diimplementasikan pada pengelolaan PPS milik pemerintah. Dari tujuan penelitian untuk menganalisis penyebab belum optimalnya kompetensi pengelola burung kakaktua dan merumuskan strategi pengembangan kompetensi pengelola burung kakaktua, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kompetensi pengelola satwa liar di PPS Tegal Alur, yang mencakup kompetensi taksonomi, medis, perilaku, hukum, dan logistik, secara umum belum mencapai tingkat optimal. Kesenjangan kompetensi ini disebabkan belum adanya pelatihan taksonomi, medis satwa liar, perilaku satwa liar, spesifikasi teknis kandang transportasi, kandang transit dan perencanaan kandang untuk menghadapi banyaknya satwa yang masuk, terbatasnya pelatihan terkait peraturan baru dan peraturan turunan, serta belum adanya desain pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.
2. Strategi mengembangkan kompetensi pengelola satwa liar di PPS meliputi pelaksanaan kegiatan magang dan *benchmarking* ke lembaga konservasi yang telah berhasil dalam pengelolaan satwa liar. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan Pusat Diklat guna mendesain dan menyelenggarakan program pelatihan secara berkelanjutan. Kegiatan pendukung lainnya seperti sosialisasi, seminar, dan workshop juga perlu dilakukan melalui kerja sama lintas instansi untuk memperluas wawasan dan mengembangkan kompetensi pengelola.

4.2. Rekomendasi

Rekomendasi penelitian ini adalah:

1. Bagi Balai KSDA Jakarta, selaku instansi yang menaungi PPS Tegal Alur, agar meningkatkan kompetensi pengelola PPS secara terintegrasi dan berkelanjutan. Pengembangan kompetensi ini dapat diintegrasikan melalui kerja sama dengan Pusat Diklat SDM serta Lembaga Konservasi lainnya, dengan berbagai bentuk kegiatan seperti pelatihan teknis, bimtek, magang, *benchmarking*, workshop, dan bentuk pengembangan kompetensi lainnya. Selain itu, penting bagi BKSDA Jakarta untuk menyusun program pengembangan kompetensi pegawai yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan guna mendukung pengelolaan satwa liar yang lebih profesional. Dengan melakukan strategi memanfaatkan peluang eksternal yang ada untuk mencapai

aspirasi yang diharapkan ini maka indikator keberhasilan pengelolaan satwa liar di PPS dapat tercapai yaitu terwujudnya PPS Tegal Alur menjadi Lembaga Konservasi Khusus yang memenuhi standar pengelolaan, meningkatnya persentase translokasi satwa dari PPS Tegal Alur dan meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN PPS Tegal Alur.

2. Bagi Pusat Diklat SDM Kementerian Kehutanan agar menyusun kebijakan teknis berupa panduan pengembangan kompetensi, merancang kurikulum pelatihan serta melaksanakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pengelola dalam penyelamatan satwa liar di Lembaga Konservasi *Ex-Situ*.
3. Bagi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Kehutanan agar mengembangkan kompetensi ASN dan Non ASN melalui strategi pembelajaran secara terintegrasi yaitu penerapan *corporate university* di Kementerian Kehutanan.
4. Bagi peneliti serta praktisi pengelolaan satwa liar agar menguji validitas model kompetensi pada jenis satwa liar lain, sehingga dapat memperkuat generalisasi dan penerapan model dalam konteks yang lebih luas.

Daftar Referensi

- Alfian, Nurliani, A., dan Sundari, T. 2024. Perilaku Macan Dahan Kalimantan (*Neofelis Diardi Borneensis*) di Kandang Transit Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan. *BIOSCIENTIAE*, 21(1):57-67.
- Becker, G.S. 1962. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. *Journal of Political Economy*, 70(5):9-49.
- Birahy P. 2021. 3 Tahun di Kandang, Puluhan Satwa Belum Pindah Habitat Lantaran Terlalu Jinak. <https://terasmluku.com/ambonku> (diakses pada tanggal 4 Mei 2024).
- Biryanto, 2024. Analisis Strategi SOAR pada Pengembangan Corporate University di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau. *Prosiding PITNAS Widyaiswara*, 1(2024):116-126.
- BKSDA. 2018. *Potret Pengelolaan Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur*. Jakarta: Balai KSDA Jakarta.
- Cita, K.D., Hernowo, J.B., dan Masy'ud, B. 2019. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Konservasi *Ex situ* Cendrawasih Kecil (*Paradisaea minor* Shaw, 1809). *Buletin Plasma Nutfah*, 25(1):13-24.
- DataIndonesia.id. 2022. Sebanyak 1.217 Spesies Hewan Terancam Punah di Indonesia. <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-1217-spesien-hewan-terancam-punah-di-indonesia> (diakses tanggal 4 Mei 2024).
- Doly, D. 2015. Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar. Info Singkat Hukum, Vol. VII No. 09/I/P3DI/Mei 2015, Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Emihandayani, E. 2019. Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan Gembira Loka Zoo Yogyakarta. Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha. Yogyakarta: STIE Widya Wiwaha.
- Fahik, M., Masy'ud, B., dan Hernowo, J. 2018. Faktor Penentu Keberhasilan Penangkaran Burung Kakatua Sumba (*Cacatua sulphurea citrinocristata*, Fraser 1844). *Media Konservasi*, 23(3):210-215.
- Halimah, D. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Sumatera Utara. *Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum*, 2(1):32-42.
- Hasiholan, W. 2018. *Penanganan Barang Bukti: Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Bogor: Pusat Diklat SDM LHK.
- Indrawan, M., Primack, R.B., dan Supriatna, J. 2007. *Biologi Konservasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- IUCN. 2022. *Pedoman Penanganan Organisme Hidup Hasil Sitaan*. Gland, Swiss: IUCN.
- Mardiastuti, A., Kusriani, M.D., Mulyani, Y.A., Manullang, S., dan Soehartono, T. 2011. *Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018*. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- McClelland, D.C. 1973. Testing for Competence Rather Than for "Intelligence." *American Psychologist*, 28(1):1-14. <https://doi.org/10.1037/h0034092>.
- Pangsuma, NS., dan Hidayat, T. 2023. Urgensi Pemahaman Taksonomi Dalam Pembelajaran Biologi. *Jurnal Biodik*, 9(2):95-110.
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Spesifikasi Teknis Kandang Transportasi dan Kandang Transit Satwa Liar.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi.

- Pratiwi, AN. 2022. Pengelolaan dan Tingkat Kesejahteraan Buaya Muara (*Crocodylus porosus* Schneider, 1801) di Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur, Jakarta. Jakarta: Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- ProFauna Indonesia. 2025. Fakta tentang Satwa Liar Indonesia. <https://www.profauna.net/> (diakses pada tanggal 4 Mei 2025).
- Puspa, A. 2020. Burung Kakaktua Paling Banyak jadi Korban Perdagangan Satwa Ilegal. Media Indonesia.com. <https://mediaindonesia.com/humaniora/371447/burung-kakaktua-paling-banyak-jadi-korban-perdagangan-satwa-ilegal> (diakses pada tanggal 4 Mei 2024).
- Rivera, S.N., Knight, A., dan McCulloch, S.P. 2021. Surviving the Wildlife Trade in Southeast Asia: Reforming the 'Disposal' of Confiscated Live Animals under CITES. *Animals*, 11, 439. <https://doi.org/10.3390/ani11020439> (diakses pada tanggal 12 Januari 2025).
- Rudiansyah dan Radhi, M. 2019. Perilaku Satwa Liar Pada Kelas Burung (Aves). Aceh: Program Studi Kehutanan. Fakultas Pertanian, Universitas Almuslim.
- Seibert, L. M. 2006. Feather-Picking Disorder in Pet Birds. *Manual of Parrot Behavior*, 255–265.
- Spencer, LM., dan Spencer, SM. 1993. *Competence at Work: Models for Superior Performance*. New York: Jhon Wiley & Sons Inc.
- Stavros, J, Cooperrider, D. & Kelley, D.L. (2003). Strategic Inquiry! Appreciative Intent: Inspiration to SOAR A New Framework for Strategic Planning. May 11, 2024. https://www.academia.edu/19912532/Strategic_Inquiry_Appreciative_Intent_Inspiration_to_SOAR_A_New_Framework_for_Strategic_Planning.
- Suryani, Y., Fitri, N.A., Tatiana, E., dan Taupiqurrohman, O. 2021. Kajian Perilaku Beruang Madu (*Helarctos malayanus*) di Kandang Transit Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah. *Gunung Djati Conference Series*, 6(2021): 200-208.
- Syaputra, M., Suparyana, P.K., dan Wulandari, F.T. 2022. Strategi Konservasi Kakaktua Kecil Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea occidentalis*) Secara Ex Situ di Lembaga Konservasi. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 19(2):139-157.
- TribunMaluku.com. 2019. BKSDA Maluku Selamatkan 1.402 Satwa. <https://www.tribun-maluku.com/bksda-maluku-selamatkan-1-402-satwa/01/31/>(diakses pada tanggal 31 Mei 2024).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Wardojo, W. 2021. *Inspirasi dari Gunung Gede Pangrango*. Jakarta: Direktorat Jenderal KSDAE.
- White, N.E., Phillips, M.J., Gilbert, M.T.P., Alfaro-Nunez, A., Willerslev, E., Mawson, P.R., Spencer, P.B.S., dan Bunce, M. 2011. The Evolutionary History of Cockatoos (Aves: Psittaciformes: Cacatuidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 59(2011): 615-622.
- Widjaja, E.A., Rahayuningsih, Y., Rahajoe, J.S., Ubaidillah, R., Maryanto, I., Walujo, E.B., dan Semiadi, G. 2014. *Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Wild Welfare.org. 2025_a. Pelayanan Kesehatan Hewan. <https://wildwelfare.org/> (diakses tanggal 19 Mei 2025).
- Wild Welfare.org. 2025_b. Perilaku Satwa. <https://wildwelfare.org/>(diakses tanggal 19 Mei 2025).
- Wild Welfare.org. 2025_c. Catatan, Perencanaan dan Protokol. <https://wildwelfare.org/>(diakses tanggal 19 Mei 2025).
- Zalukhu, R.R., Delipiter, L., Arisman, R. 2025. The Effectiveness of Employee Training and Development: A Systematic Review from a Human Resource Management Perspective. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*, 10(2): 1027-1043.